

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wacana penguatan masyarakat melalui pengembangan dan pemberdayaan berbasis potensi lokal akhir-akhir ini, telah memberikan sebuah peluang munculnya kesadaran masyarakat untuk lebih mengambil peran secara aktif dalam pembangunan. Semangat desentralisasi yang sinergis dengan pewacanaan tersebut, tidak hanya semata membuka kesempatan terbentuknya daerah otonomi baru baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, melainkan lebih jauh lagi yakni memberikan pemahaman bahwa harus segera dilakukan langkah-langkah yang lebih jelas guna menangani persoalan masyarakat Indonesia kontemporer yang masih berkatat pada belum meratanya pembangunan oleh pemerintah yang berakibat buruk berupa karakter diskriminatif dan destruktif pada skala yang meskipun tidak mengkhawatirkan namun sulit ditolak sebagai sebuah *symptomatic* (gejala umum). Diskriminatif dalam hal ini dimaksudkan pembangunan masih terpusat pada wilayah tertentu tanpa memperhatikan urgensi kebutuhan yang semestinya menjadi ukuran. Sedangkan destruktif adalah sebuah reaksi atas ketertindasan masyarakat terhadap otoritas pemerintah yang cenderung membela kepentingan kelompok tertentu. Kontekstual ideologisnya adalah, betapapun Indonesia berdasar pada Pancasila yang memiliki nilai-nilai luhur

sebagai pedoman berbangsa dan bernegara, tafsir oleh pemerintah masalah limitatif. (Septiana, 2012:35).

Persoalan masyarakat Indonesia masih lekat dengan rendahnya kemampuan untuk memberikan pendidikan hingga tingkat tertinggi bagi anak-anaknya, untuk mengakses fasilitas kesehatan yang sigap dan antisipatif dengan kualitas prima, serta bahkan untuk mengonsumsi sumber nutrisi yang ideal secara periodik dan teratur konstan. Penyelesaian persoalan yang demikian tentu membutuhkan kerjasama dan kesadaran bersama, bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri, melainkan membutuhkan orang lain dan lembaga yang ada disekitarnya, sehingga dari sinilah kemudian terjadi kontrak sosial antara individu-individu untuk menyerahkan sebagian hak yang dimilikinya kepada institusi bernama negara guna diatur dan dikelola agar terpenuhi kebutuhan hidup, seperti: kesejahteraan, keamanan, pendidikan, kesehatan, dll. (Indiahono, 2009:58).

Kenyataannya memang, meskipun kini telah memasuki era desentralisasi yang dilaksanakan pasca Reformasi, dengan konsekuensi berupa munculnya keterbukaan adanya suatu kesadaran (*consciousness*) bahwa penyelenggaraan pembangunan tidak bisa lagi dimobilisasi secara seragam di banyak tempat dan dalam rentang waktu yang bersamaan, namun tetap saja masih terdapat ganjalan berupa minimnya komitmen pemangku kepentingan yang menjadikan masyarakat dominan berada pada porsi marginal.

Minimnya komitmen para pemangku kepentingan tersebut diperparah dengan efek dominonya yaitu ketidakberdayaan masyarakat dalam pencapaian terhadap akses

politik dan ekonomi (*political and economical accesbility*). Akibat paling mungkin dari situasi ini tentu saja adalah eksisnya keterbatasan masyarakat untuk dapat berkembang menjadi lebih baik melalui upaya pengelolaan potensi yang ada disekitarnya.

Rendahnya inisiatif pemangku kepentingan daerah dan belum dimilikinya kapasitas komunal oleh masyarakat, menjadikan kompleksitas masalah pemberdayaan mengharuskan Pemerintah melibatkan semua pihak yang memiliki kepedulian dan menjamin bahwa pandangan masing-masing diperhatikan, sebab hanya dengan pembuatan proses penyusunan kebijakan menjadi lebih partisipatori, transparan, dan akuntabel, maka keberhasilan bisa dicapai, sebab, Pemerintah dalam hal ini adalah institusi legal yang secara konstitusional diberi amanah oleh rakyat untuk memenuhi kebutuhan kolektif. Pemerintah tidak selayaknya hanya bertindak atas nama pemilik otoritas tunggal formal, melainkan wajib mengoordinir berbagai pemangku kepentingan terkait; *civil society*¹, kalangan pebisnis, kelompok pendonor, dan tentu saja adalah masyarakat itu sendiri, hal ini bertujuan agar langkah-langkah pemberdayaan tersebut bisa dijalankan penuh sinergisitas.

Secara teoritis, sebagai bentuk pembangunan alternatif, pemberdayaan masyarakat menekankan pentingnya pembangunan berbasis masyarakat (*community based development*) yang bersifat *bottom up* (atas inisiatif masyarakat) dan lokalitas (Zubaedi, 2013:vi). Prinsip ini dimaksudkan agar program yang dijalankan tidak bersifat memaksakan pemberdayaan tanpa mengakomodasi keluhuran lokalitas

¹ Dapat dimaknai sebagai kumpulan institusi atau organisasi di luar pemerintah dan sektor swasta, atau sebagai ruang tempat kelompok-kelompok sosial dapat eksis dan bergerak.

masyarakat. Pemberdayaan diarahkan untuk dapat menjadikan masyarakat mandiri secara inisiatif sehingga tidak lagi tergantung dengan pihak luar yang telah memberikan bimbingan serta pendampingan. Dengan demikian, pemberdayaan merupakan proses berkelanjutan yang hendaknya terus berjalan meskipun pendampingan sudah tidak dilakukan. Meskipun hal ini sulit sekali dicapai mengingat mayoritas penduduk sebagai sasaran pemberdayaan, berada di berbagai daerah di Indonesia yang cenderung lebih besar ada di wilayah perdesaan yang rata-rata penduduknya menggantungkan diri pada sektor agraris. (Alfitri, 2011:4).

Namun demikian, bukan berarti pemberdayaan tidak dapat untuk dilakukan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk memperkuat hubungan kelembagaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat serta memperluas partisipasi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. (Wrihatnolo, dan Riant, 2007:33).

Pendekatan pemberdayaan merupakan operasionalisasi dari paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat, sampai pada tingkat komunitas terbawah diberikan peluang berikut kewenangan dalam pengelolaan pembangunan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan sejak identifikasi masalah, kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta dalam menikmati hasil pembangunan (Soetomo, 2011:66). Namun demikian, tetap saja terbuka ancaman ketidakberhasilan dari sebuah aksi pemberdayaan yang bisa saja dikarenakan oleh, antara lain yakni, ketidaksiapan penerima suatu program

pemberdayaan, luasan cakupan area implementasi program, atau kurang idealnya konseptualisasi pemberdayaan oleh pemerintah. Salah satu cara yang dapat ditempuh guna meminimalisir hal-hal tersebut adalah dengan pendekatan *CD*.

Pendekatan *CD* memungkinkan dilakukannya pemberdayaan oleh pihak di luar pemerintah, hal ini sebagai alternatif cara mengantisipasi kekurangsiapan finansial pemerintah terhadap kewajiban pemberdayaan, sedangkan terdapat pihak-pihak lain yang dimungkinkan memiliki kecukupan kapabilitas untuk turut serta aktif membantu pemerintah dalam rangka memberdayakan masyarakat, mengolah sumber daya lokal masyarakat setempat.

Seperti yang terjadi di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Berdiri pada tahun 2007, Desa Pesawaran Indah yang merupakan hasil pemekaran dari Desa Bunut Kecamatan Padang Cermin ini, sejak berdirinya telah berhasil beberapa kali memperoleh program pemberdayaan. Desa dengan keindahan alamnya ini secara geografis berada pada wilayah dataran tinggi. Mata pencaharian masyarakatnya didominasi oleh petani dan pekebun. Sebagai desa yang merupakan bekas areal perkebunan negara, Desa Pesawaran Indah memiliki ragam potensi sebagai pengembangan pemberdayaan.

Berdasarkan data pra-riset yang penulis peroleh, Desa Pesawaran Indah setidaknya telah mendapatkan beberapa program-program yang berkenaan dengan pemberdayaan, diantaranya, *pertama* PLTAMH yang terletak di Dusun Sidoarjo, Dusun Sidosari, dan Dusun Margosari. *Kedua*, energi biogas. Energi ini diperoleh

dari limbah (kotoran) ternak sapi. Pembuatan reaktor biogas ini disumbangkan oleh Kementerian ESDM dan LPM Unila.

Ketiga, usaha ternak sapi. Usaha ini berada dalam pembinaan APDASI. Sesuai dengan kesepakatan, APDASI menyediakan bimbingan teknis, kesehatan, pasar, dan penjualan hasil. *Keempat*, program peningkatan kapasitas hutan koservasi. Program ini melibatkan juga Unila serta salah seorang Anggota DPD RI Provinsi Lampung. *Kelima*, ADD. ADD ini merupakan dana stimulus yang berasal dari APBN. Besaran dana ini yang secara khusus diperuntukkan bagi langkah pengentasan kemiskinan baru sebatas stimulus, dengan persentase yang hanya 9% dari keseluruhan dana ADD.

Keenam, pendirian koperasi. Atas inisiasi Unila, Desa Pesawaran Indah diberdayakan melalui Koperasi “Sinar Banyu Mandiri”, koperasi ini dikuatkan eksistensinya dengan menjadi penghubung utama dalam mengembangkan kerjasama dengan pihak luar Desa Pesawaran Indah. *Ketujuh*, PNPM-MPd. Program ini meliputi pemberdayaan desa dari sisi infrastruktur berikut pemberdayaan potensi ekonomis desa. *Kedelapan*, program hibah bibit kambing dan sapi dari Dinsosnakertrans Provinsi Lampung. Hibah ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangbiakkan ternak sapi dan kambing tanpa harus kesulitan mencari modal finansial guna pengadaan bibit, sekaligus tanpa terbebani kewajiban pengembalian.

Dari beberapa program tersebut, yang menarik bagi penulis adalah program energi biogas sebagai basis energi mandiri. Program ini bila dirunut, ternyata memiliki kaitan simbiosis dengan program lainnya. Program biogas yang menggunakan

limbah ternak sapi ini di satu sisi menjadikan residu ternak sebagai bahan bakar yang tidak hanya murah namun juga ramah lingkungan karena tidak terbuang begitu saja, di sisi lain, karena sifatnya yang membutuhkan limbah ternak sapi sebagai bahan bakarnya, maka diperlukan ketersediaan ternak sapi yang memadai guna memenuhi kebutuhan biogas tersebut, dengan demikian diperlukan jumlah ternak sapi yang cukup untuk menjamin ketersediaan limbah. Secara ekonomis hal ini tentu akan membantu peternak dalam hal pengurangan pengeluaran biaya untuk konsumsi bahan bakar gas.

Menurut hasil riset Hartoyo dan Sigit (2012:8-9), faktor utama Desa Pesawaran Indah berhasil dalam membangun desa mandiri energi terletak pada kemampuannya menggali serta memanfaatkan ragam sumber daya sebagai modal, antara lain:

- 1) Modal Alam. Secara alamiah, Desa Pesawaran Indah terletak di lereng gunung Wan Abdul Rahman. Daerah ini berhawa sejuk, bertanah subur dengan sungai yang mengalir sepanjang tahun. Desa ini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai wilayah pengembangan pertanian dan peternakan secara kolektif dan berkelanjutan.
- 2) Modal Fisik. Secara fisik sarana prasarana transportasi di Desa Pesawaran Indah sudah cukup memadai. Kondisi ini menunjang pemasaran hasil-hasil pertanian dan peternakan.
- 3) Modal Manusia. Desa Pesawaran Indah dihuni oleh mayoritas masyarakat berpendidikan rendah, tetapi mereka memiliki kecukupan pengalaman dalam hal olah tani dan ternak secara tradisional. Selain itu mereka senantiasa

bersemangat untuk maju dan tidak tertutup dengan inovasi atau hal baru yang berasal dari luar.

- 4) Modal Finansial. Pada mulanya penduduk Desa Pesawaran Indah amat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan finansial guna mengelola usaha pertanian dan peternakan, akhirnya mereka berhasil berhubungan dengan pihak luar untuk memperoleh bantuan finansial.
- 5) Modal Sosial. Modal sosial dibedakan menjadi dua, *pertama*, modal sosial struktural. Modal sosial ini ditunjukkan oleh hubungan yang kuat antara individu masyarakat (sebagai anggota) dengan organisasi lokal. *Kedua*, modal sosial kognitif atau kultural. Modal ini ditunjukkan oleh adanya kapasitas kultural seperti, norma-norma, nilai-nilai bersama, hubungan timbal-balik, solidaritas sosial, kepercayaan, dan keyakinan.

Hartoyo dan Sigit menerangkan bahwa kelima modal tersebutlah yang kemudian disinergikan fungsinya dengan mewujudkan manfaat utama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Pesawaran Indah, yang terealisasi pada pengembangan energi listrik tenaga air dan energi biogas. Energi biogas yang membutuhkan asupan residu (kotoran) ternak sapi sebagai bahan bakar, sudah barang tentu harus dipenuhi secara berkelanjutan agar dapat terus diberdayakan kebermanfaatannya.

Berdasar pada hasil riset tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Pesawaran Indah telah secara optimal mengerahkan segenap potensinya untuk memberdayakan potensi yang mereka miliki. Terjalin sinergi antara kesiapan masyarakat untuk diberikan pembinaan program pemberdayaan biogas, dengan pemanfaatan potensi lokal yang tersedia. Namun demikian menurut peneliti,

keberadaan program mandiri energi biogas belum dielaborasi pada ranah bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Peneliti mengambil fokus penelitian pada bagaimana pelaksanaan pemberdayaan melalui adanya program ini, dengan menggunakan pendekatan *CD* karena program biogas merupakan injeksi dari pihak eksternal masyarakat desa yang diimplementasikan menurut potensi yang ada.

Analisis ini menarik bagi peneliti karena untuk melihat sejauh mana program biogas yang dilaksanakan di Desa Pesawaran Indah ini memberikan kebermanfaatan ataupun justru persoalan baru, sehingga dapat diupayakan formulasi program secara lebih baik. Sebagaimana yang peneliti ketahui, beberapa persoalan yang muncul dalam pengembangan energi ini yakni minimnya pakan untuk ternak sapi yang digemukkan, dan sering terhentinya aktifitas biogas karena bila sapi yang digemukkan telah memasuki masa panen, maka tidak ada lagi sapi yang tersisa untuk dapat diambil kotorannya.

Diceritakan oleh Bapak Ruwadi yang menjabat sebagai Sekdes Pesawaran Indah, bahwa persoalan lain yang juga dapat muncul ketika program penggemukan ternak sapi hendak dikembangkan adalah, persaingan antar kelompok yang pada akhirnya merusak tatanan persaudaraan dan justru kontraproduktif karena sesama kelompok peternak berebut pakan. Program biogas yang tidak diberikan kepada setiap peternak sapi pun, pada akhirnya dapat menjadi sumber konflik baru.

Perspektif *CD* sebagai pendekatan untuk menganalisis dampak pemberdayaan masyarakat di Desa Pesawaran Indah merupakan pembuka peluang untuk optimalisasi pengelolaan sumber daya masyarakat agar fokus pada aktifitas yang

tidak hanya memberikan suplai finansial tanpa disertai pemberian bekal keterampilan yang bisa menjadikan masyarakat mandiri. Analisis ini akan memberikan gambaran secara jelas tentang bagaimana program biogas ini diterapkan di masyarakat. Tujuannya tidak lain adalah agar terwujud kerja nyata dari beragam pihak berkemampuan guna memberikan sumbangsinya melalui pemberdayaan. Secara spesifik, peneliti menggunakan pendekatan *development of community* yang merupakan salah satu varian dari *CD*. Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat sebagai subyek inisiator yang partisipatif dan mandiri, meskipun diawali dengan bimbingan dan pembinaan dari pihak luar.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah, bagaimana pelaksanaan program biogas di Desa Pesawaran Indah dalam perspektif *development of community*.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program biogas di Desa Pesawaran Indah dalam perspektif *development of community*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian dapat menambah pengetahuan tentang pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah setempat, pemerintah desa, dan pihak *civil society* agar lebih mampu mengembangkan program yang mendukung kesejahteraan masyarakat.